

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah penelitian ini ditinjau dari fungsi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di dalam masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai penyelenggara PLS dan peranan LSM di dalam pengembangan industri kecil.

#### 1. Fungsi PLS di dalam Masyarakat

Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah, fungsinya mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional (Bumi Aksara, 1992:4-5). Jika ditelusuri sejarah perkembangannya, PLS atau nama lain yang digunakan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari dapat diketahui bahwa salah satu fungsinya adalah pengentasan masyarakat miskin khususnya di pedesaan (Santoso S. Hamijoyo, 1992:1; Ahmed dan Coombs, 1977: 27-109; 1974:40-272; Kindervatter, 1979:157-203; Sutaryat Trisnamansyah, 1986: 4.29-4.34; Sanafiah Faisal, tt.:21-391).

Program PLS untuk mengentaskan masyarakat miskin di pedesaan sangat beragam. Program ini meliputi pendidikan pedesaan melalui berbagai jenis media di Columbia, pendidikan gabungan antara pendidikan sekolah dan PLS di Cuba, pendidikan komprehensif oleh dan untuk para pemuda, pramuka di Jombang dan Paket A di Indonesia, kemah kerja pemuda di luar sekolah di Jamaica, kordinasi pembinaan dan pengembangan PLS di Kenya, pendidikan pilihan bagi daerah miskin di Mali, PLS bagi pemuda di Srilangka, pendidikan inovatif pemberantasan buta huruf di Thailand, pendidikan alternatif Sekolah Dasar (SD) daerah pedesaan di Volta Hulu,

pendidikan yang diintegrasikan dengan pembangunan pertanian di Afganistan, latihan keterampilan keliling di daerah pedesaan Columbia, PLS untuk pengembangan wirausaha di India, pendidikan serba guna bagi para petani di Korea Selatan, pendidikan bagi pengusaha industri kecil dan para pelatih magang di Nigeria, latihan bagi para petugas lapangan pertanian varitas baru tanaman padi dan pendidikan pengembangan kewirausahaan bagi pengusaha industri kecil di Pilipina, pendidikan koperasi di Tanzania, latihan keliling bagi pedagang di Thailand, pendidikan pemberantasan buta aksara, keluarga berencana, pertanian dan kesehatan masyarakat desa di Ethiopia (Djudju Sudjana, 1989:165-166; Leon V.Chico, 1981; Malcolm Harper, 1984; Lyra Srinivasan, 1977:104-109).

Satuan, fungsi dan tujuan PLS di dalam pemerintahan semakin kokoh jika dilihat dari sisi juridis formal setelah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 khusus tentang PLS. Di dalam Pasal 10 Ayat 1 undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa fungsi pendidikan sekolah dan PLS saling melengkapi sebagai jalur meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Bumi Aksara, 1992:5). Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah ini dibuat program prioritas penelusuran konsep operasional PLS yang handal dan terakomodasi dalam satuannya, yaitu pendidikan keluarga, penitipan anak, kelompok bermain, kelompok belajar, kursus dan satuan pendidikan sejenis (Soedijarto,1992:9).

Pemerintah telah berupaya mengembangkan PLS di Indonesia. Untuk menunjang program PLS, pemerintah telah mendirikan sembilan buah balai pengembangan kegiatan belajar dan 223 buah sanggar kegiatan belajar (Soedijarto, 1992: 14). Di samping itu, pendidikan yang dilakukan masyarakat telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Sutaryat Trisnamansyah (1993:16) mengemukakan bahwa pada tahun 1964 tercatat ada 3000 kursus, tahun 1976 menjadi 4644 kursus, tahun 1982

menjadi 7138 kursus, tahun 1986 bertambah menjadi 13414 kursus dan pada tahun 1991 bertambah lagi menjadi 19500 kursus. Kursus ini lebih dari 100 jenis yang terhimpun di dalam 12 macam rumpun, yaitu (1) kursus bahasa, (2) kursus jasa, (3) kursus tentang kerumahtanggaan, (4) kursus keolahragaan, (5) kursus kesehatan, (6) kursus kesenian, (7) kursus teknik, (8) kursus kerajinan industri, (9) kursus pertanian dan peternakan, (10) kursus ilmu pengetahuan, (11) kursus lingkungan hidup, dan (12) kursus maritim. Juga, masih relatif banyak rumpun PLS yang belum didata secara formal oleh pemerintah atau belum terakomodasi dalam rumpun satuan tersebut misalnya pengajian di rumah-rumah seorang guru secara pribadi.

PLS banyak diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat baik secara kelompok maupun secara individu. Di wilayah Bandung, banyak LSM yang menyelenggarakan PLS dan salah satu di antaranya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Pengembangan Usaha (LSM WPU) yang disebut juga Partner for Business Development (PBD). LSM WPU adalah suatu lembaga yang mempunyai misi membina wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik yang ada di wilayah Bandung (kotamadia dan kabupaten). Pembinaan yang dilakukan terutama difokuskan pada peningkatan dan pengembangan kualitas wirausaha melalui berbagai program pembelajaran meliputi *pembelajaran di bidang teknis, non-teknis, dan bantuan lain-lain*. Pembinaan dilakukan oleh LSM WPU dengan menerapkan konsep kemitraan. Di samping menjalin kemitraan dengan wirausaha target grup binaannya, LSM WPU juga menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga luar dan dalam negeri, meliputi lembaga pemerintah dan swasta. Lembaga mitra kerja LSM WPU dari luar negeri adalah Swisscontact Foundation dan dari dalam negeri di antaranya Balai Besar Logam dan Mesin, Unit Informasi Industri Kecil, Yayasan Dharma Bhakti Astra, Politeknik Manufaktur Institut Teknologi Bandung, Bank Exim dan Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen Jakarta.

## 2. LSM Sebagai Penyelenggara PLS

Non Governmental Organization (NGO) atau organisasi non-pemerintah adalah semua organisasi kemasyarakatan yang berada di luar struktur dan birokrasi pemerintah. Batasan NGO relatif luas karena mencakup berbagai jenis dan ragam organisasi yang ada di dalam masyarakat sehingga bisa membingungkan. NGO bukan organisasi tandingan dari organisasi pemerintah. Jika ditinjau dari makna bahasanya, NGO terkesan sebagai organisasi tandingan dari organisasi pemerintah yang bisa saja diartikan berlawanan dengan pemerintah. Agar terhindar dari kesan ini, nama NGO kemudian diubah menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Is-mid Hadad, 1984:12; Sabastian Saragih, 1993:7).

Kapasitas LSM bukan bagian dari birokrasi, melainkan lembaga pengawasan independent, lembaga pemberdaya masyarakat yang independent dan lain-lain (Mu-byarto, 1994:4). Saat ini, nama LSM inilah yang biasa digunakan masyarakat sebagai pengganti nama NGO dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari aktivitasnya, LSM juga sebagai penyelenggara PLS. Aktivitas LSM mencakup berbagai bidang kehidupan seperti pembelajaran, teknologi, hukum, ekonomi, sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan dan pembangunan masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya.

Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 dinyatakan, bahwa

LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat di dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya (Sabastian Saragih, 1993:4).

LSM merupakan gerakan kesadaran masyarakat atas keberadaannya. LSM dibentuk oleh masyarakat atas dasar kesadaran, kemanusiaan dan kebersamaan yang

mendalam karena melihat keadaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan memprihatinkan seperti kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, hak asasi dan lingkungan, sehingga memunculkan perasaan terpancang. Kesadaran dan perasaan terpancang ini mendorong mereka untuk mencari cara dan melakukan upaya mengatasi keprihatinan tersebut. Kemudian, cara ini diaktualisasikan melalui aktivitas nyata dan realistis dengan prakarsa sendiri.

Akhir-akhir ini, pemerintah menggalakkan program kemitraan. Banyak program kemitraan yang dijalin antara perusahaan berskala besar baik badan usaha milik negara maupun swasta, LSM dan lembaga lain dengan usaha skala kecil dan menengah dalam pola bapak angkat - anak angkat. Program kemitraan ini dicanangkan oleh pemerintah sejak Pembangunan Lima Tahun IV (PELITA IV) (Bambang Trisulo, 1991:48) dan dijadikan gerakan nasional sejak 14 Pebruari 1991 (Trisura Suhardi, 1991:110). Pada tanggal 15 Mei 1996, Presiden Republik Indonesia mencanangkan gerakan kemitraan usaha nasional di istana negara yang dihadiri oleh para pengusaha besar swasta nasional yang tergabung di dalam kelompok PT. Mitra Dana Jimbaran dan para pejabat lain (The Indonesia Times, 1996:1). Untuk mendukung program ini, seluruh perusahaan besar swasta diharapkan dapat berpartisipasi. Ada 4600 perusahaan swasta telah diminta untuk membuat pernyataan kerja sama dengan 22000 unit usaha kecil melalui *forum komunikasi* pada tingkat provinsi (Lalkaka, 1992:4) dan ada Rp 50 milyar telah disiapkan oleh PT. Mitra Dana Jimbaran untuk membantu pengusaha kecil (Media Indonesia, 1996:2). Tujuannya agar para wirausaha industri kecil dapat mengelola dan mengembangkan usahanya menjadi berkembang, lebih baik, dan mandiri.

Thee Kian Wie (1992:4) mengemukakan bahwa kemitraan pola bapak angkat - anak angkat ada beberapa jenis, yaitu *pola dagang*, *pola vendor*, *pola sub-kontraktor*, dan *pola pembinaan*. *Pola dagang* adalah kerja sama berbentuk hubu-

ngan dagang biasa antara produsen dan pemasar. *Pola vendor* adalah kerja sama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional bapak angkat, tetapi tidak mengikat kepastian pemakaian bahan yang dipasok anak angkat atau mitra usahanya. *Pola subkontraktor* adalah kerja sama dilakukan dengan hubungan produksi yang dihasilkan oleh mitra usaha menjadi bagian dari sistem produksi bapak angkat. *Pola pembinaan* adalah kerja sama dilakukan untuk memberi kesempatan kepada pengusaha kecil yang memiliki potensi produksi, tetapi lemah di dalam pengelolaan dan pemasaran serta tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha bapak angkat. Keempat pola kemitraan ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu *direct economic linkages* dan *indirect economic linkages* (Henri Saparini, 1995:5). *Direct economic linkages* adalah kemitraan yang memiliki keterkaitan ekonomis secara langsung. *Indirect economic linkages* adalah kemitraan yang secara tidak langsung bersifat keterkaitan ekonomis.

LSM WPU merupakan salah satu dari LSM di wilayah Bandung yang melakukan "program kemitraan pola pembinaan dengan industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik, dan dengan lembaga lain." LSM WPU adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk secara sukarela, bersifat non-profit, atas kerja sama antara Yayasan Mandiri dengan Swisscontact Foundation yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknisnya, untuk berpartisipasi mengentaskan masyarakat miskin di Indonesia khususnya wirausaha industri kecil manufaktur dan mengatasi masalah yang dihadapi mereka dengan menggunakan pendekatan kerja bersama dengan target grup, dilakukan secara kontiniu, menekankan peningkatan harga diri agar terhindar dari ketergantungan pada lembaga atau kelompok yang lain. Sedangkan, Yayasan Mandiri adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela mempunyai misi pengembangan sumber alam dan teknologi untuk kesejahteraan manusia, partisipannya siapa

saja yang mempunyai minat terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan kelompok sasaran siapa saja yang membutuhkan, tujuan akhir tercapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan kemampuan dan kepercayaan diri rakyat Indonesia, untuk pemecahan masalah mereka, pengembangan teknologi yang sesuai dengan budaya Indonesia, berorientasi pada keadilan, kemerdekaan, kemuliaan manusia. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan yang dilakukan adalah bekerja dan belajar bersama dalam usaha mengembangkan sumber daya setempat, melalui kegiatan pelayanan masyarakat, penelitian, pengembangan di bidang teknologi, pemasyarakatan, dan penyebarluasannya. Sumber dayanya berasal dari intern Yayasan Mandiri, simpatisan, partisipan, sumber daya setempat. Yayasan ini didirikan dengan akte notaris tertanggal 21 Desember 1979, atas nama Notaris Bandung Raden Soegeng Dirdjodipuro, SH dan berdasarkan Pancasila (Aktenotaris, 1979:1).

Landasan hukum yang dapat dijadikan dasar didirikannya LSM di antaranya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 (UURI No. 8 Thn. 1985) tentang organisasi kemasyarakatan yang ditegaskan di dalam Bab I ayat 1, bahwa

organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta di dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila (Redaksi, 1996: 64).

UURI no. 8 Thn 1985 ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 (PPRI No. 18 Thn. 1986) tentang pelaksanaan UURI No 8 Thn. 1985 yang dinyatakan di dalam Bab II pasal 2, yaitu

anggota masyarakat Republik Indonesia secara sukarela dapat membentuk organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegiatan profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Redaksi, 1996: 79-80).

*Swisscontact Foundation* adalah NGO yang didirikan tahun 1979, oleh para pengusaha, ilmuwan, dan politikus warga negara Swiss dengan prinsip memberikan sumbangan untuk menciptakan kelas menengah dengan cara pelatihan kejuruan dan meningkatkan usaha kecil, meningkatkan kemandirian (self-help) di dalam bidang pelatihan teknik, menjalin kerja sama dengan mitra lokal, dan mentransfer teknologi melalui praktek pelatihan kejuruan. Sumber dananya dari sektor swasta (industri, bank, perusahaan asuransi, perdagangan, dan pemerintah Swiss).

Jika ditilik dari aktivitasnya, program kemitraan pola pembinaan yang dilakukan LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya merupakan upaya membelajarkan wirausaha industri kecil untuk meningkatkan kualitasnya. Melalui pembelajaran, wirausaha memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang pengelolaan dan pengembangan industrinya. Bermodalkan kemampuan ini, wirausaha diharapkan menjadi berdaya dan mandiri sehingga dapat mengelola, dan mengembangkan industri menjadi berkembang, lebih baik dan mandiri. Upaya yang ditempuh adalah memberikan bantuan pelatihan, workshop, konsultasi, pembenahan sistem organisasi, produksi, manajemen, pengurusan surat ijin, pemberian rekomendasi, modal, order, informasi, menciptakan lingkungan kondusif yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan industrinya.

Objek penelitian ini difokuskan pada *"pembelajaran nilai kewirausahaan yang dilakukan oleh LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya terhadap wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur di wilayah Bandung"*. Asosiasi Industri Kecil Manufaktur adalah suatu wadah tempat berhimpun para wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik yang dibina oleh LSM WPU di wilayah Bandung. Di dalam merealisasikan program pembelajaran, LSM WPU bermitra dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki misi dan tujuan yang sama.



Program pembelajaran yang dilakukan oleh LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya terhadap wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik meliputi *pembelajaran di bidang teknis, non-teknis dan bantuan lain-lain*. *Pembelajaran di bidang teknis* adalah peningkatan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dapat menopang peningkatan produksi industri kecil secara langsung. Bidang teknis yang diberikan ini meliputi elektroplating, membaca gambar, las, bubut, frais, dies, pelapisan, perseng, pengecoran, dan pengetahuan bahan. *Pembelajaran di bidang non-teknis* adalah peningkatan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dapat menunjang peningkatan produksi industri kecil secara tidak langsung. Bidang non-teknis ini di antaranya manajemen, pemasaran, keuangan, pembukuan, kepegawaian, informasi, business plan, dan achievement motivation training. *Bantuan lain-lain* adalah bantuan keuangan, konsultasi, informasi, pemasaran, rekomendasi, pembuatan bisnis plan, auditing, pengurusan surat izin, kredit dan lain-lain. Dengan pembelajaran ini, pengetahuan, keterampilan dan keahlian wirausaha industri kecil diharapkan bertambah dan sikap serta perilaku di dalam pengelolaan dan pengembangannya menjadi berkembang lebih baik. Pada gilirannya, sikap dan perilaku ini dijadikan nilai dan budaya yang mempribadi di dalam kehidupannya. Akhirnya dengan nilai dan budaya ini, ia dapat mengelola industri menjadi berkembang, lebih baik dan mandiri.

Agar tujuan pembelajaran nilai kewirausahaan industri kecil dapat dicapai secara optimum, LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wirausaha. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengorganisasikan wirausaha industri kecil ke dalam suatu wadah yang diberi nama *Asosiasi Industri Kecil Logam, Karet dan Plastik* atau *Asosiasi ProBengkel*. Kemudian, nama asosiasi ini diubah menjadi *Asosiasi Industri Kecil Manufaktur* tetapi nama *Asosiasi ProBengkel* masih tetap dipakai. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif,

wirausaha industri kecil diharapkan terdorong belajar terus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang pengelolaan dan pengembangan industrinya. Juga diharapkan, sikap dan perilaku mengelola dan mengembangkan industrinya berubah ke arah yang lebih baik.

Di dalam waktu yang relatif singkat, LSM WPU melaksanakan berbagai jenis dan ragam program pembelajaran. Program membelajarkan wirausaha industri kecil yang dilakukan oleh LSM WPU selama tahun 1993 sampai tahun 1995 meliputi pelatihan menggambar teknik, perhitungan biaya, perencanaan kerja, pem bukuan, pressing, evaluasi data bisnis, perpajakan, membubut, pengelasan I-II, dan III, elektroplating, echivement motivation training, dies, konvensi, kunjungan ke industri, pertemuan antara wirausaha industri kecil anggota asosiasi, pertemuan antara wirausaha industri kecil anggota asosiasi dengan mitra kerja LSM WPU seperti pembina di Unit Informasi Industri Kecil, Yayasan Dharma Bhakti Astra, kepala kantor wilayah Departemen Perindustrian Jawa Barat, Lembaga Energi Nasional, Balai Besar Logam dan Mesin, temu bisnis, studi banding di wilayah Bandung dan job training di PT. Astra Jepang, (ProBengkel, 1993: 5-6; 1994:7; 1995). Di samping itu, LSM WPU juga memberikan konsultasi kepada anggota asosiasi yang bermasalah baik yang berkaitan dengan produksi, pemasaran, keberadaan industrinya, dan lain-lain.

Hasil wawancara peneliti dengan Project Manager dan Direktur LSM WPU (24-2-1994) diperoleh keterangan bahwa LSM WPU berdiri melalui proses yang terus berkembang, tahapan yang terus meningkat, rentang waktu yang relatif panjang dan gerak yang cukup dinamis. Cikal bakal LSM WPU adalah Yayasan Mandiri yang didirikan oleh sekelompok mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada awalnya, sekelompok mahasiswa ITB yang mengisi waktu luang liburan kuliah dengan melakukan aktivitas secara informal. Aktivitas mereka adalah melakukan

pengabdian kepada masyarakat dengan membuat dan mengembangkan teknologi tepat guna di pedesaan untuk menolong masyarakat. Karena tuntutan situasi saat itu, mereka membentuk suatu lembaga yang kemudian diberi nama Yayasan Mandiri tahun 1978.

Permintaan masyarakat akan bantuan jasa mereka untuk membangun dan mengembangkan teknologi tepat guna di pedesaan jumlahnya terus meningkat dan jenisnya beragam. Berdasarkan keadaan ini, Yayasan Mandiri merasa perlu membentuk suatu lembaga khusus yang menangani proyek pengembangan teknologi tepat guna di pedesaan. Kemudian, Yayasan Mandiri membentuk lembaga khusus yang menangani proyek pembangunan dan pengembangan masyarakat di pedesaan. Lembaga ini diberi nama Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna. Lembaga khusus ini menjalin kemitraan dengan Swisscontact Foundation menggarap target grup baru yaitu wirausaha industri kecil pengolahan logam di wilayah Bandung. Swisscontact Foundation adalah suatu NGO di negara Swiss yang bergerak di bidang pengembangan teknologi. Akhirnya, target grup yang digarap oleh kedua lembaga ini meluas meliputi wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik.

Pola pembinaan khusus yang lain dari pola pembinaan masyarakat pedesaan yang selama ini dilakukan sangat dibutuhkan di dalam teknis pelaksanaan pembinaan wirausaha industri kecil target grup baru. Karena itu, Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna bersama dengan Swisscontact Foundation membentuk proyek yang diberi nama ProBengkel. Proyek ini khusus menangani pembinaan wirausaha industri kecil target grup baru. Proyek ProBengkel dibentuk tahun 1990 kemudian berubah nama menjadi Lembaga Pengembangan Industri Kecil, tetapi nama ProBengkel masih tetap digunakan (ProBengkel, 1994:2). Tanggal 2 Desember 1993, wirausaha industri kecil kelompok binaan Lembaga Pengembangan

Industri Kecil diorganisasikan di dalam suatu wadah berupa asosiasi yang diberi nama Asosiasi Industri Kecil Pengolahan Logam, Karet dan Plastik.

Tahun 1995, Lembaga Pengembangan Industri Kecil berubah nama menjadi Wahana Pengembangan Usaha (WPU) tetapi nama "ProBengkel" masih digunakan. Secara legal, WPU masih di bawah naungan Yayasan Mandiri bermitra dengan Swisscontact Foundation. Akibat perubahan ini, sistem dan struktur organisasi, mekanisme kerja dan lain-lain berubah dari lembaga yang berbasis proyek bersifat temporal menjadi lembaga yang bersifat lebih mapan dan jangka panjang (Wahana, 1995:1). Dilihat dari struktur dan fungsi organisasi Yayasan Mandiri, LSM WPU setara dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

Jumlah industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik yang dibina LSM WPU setiap tahun terus meningkat. Ada 100 industri kecil yang dibina LSM WPU sampai tahun 1995 (Wahana, 1995:3). Wirausaha yang dibina LSM WPU sebagian besar menjadi anggota Asosiasi Industri Kecil Pengolahan Logam, Karet dan Plastik. Bulan Desember 1994, asosiasi ini berubah nama menjadi "*Asosiasi Industri Kecil Manufaktur*" atau *Asosiasi ProBengkel* (Wahana, 1995:3).

Pola pembinaan wirausaha anggota asosiasi yang dilakukan LSM WPU selama ini cenderung kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia, perbaikan proses produksi, pembenahan organisasi dan bantuan lain-lain. Pembinaan yang dilakukan di antaranya berbentuk pelatihan, workshop, magang, konsultasi, supervisi, asistensi, seminar, temu bisnis, kunjungan ke industri, pemberian informasi dan rekomendasi, diskusi, konvensi, pemasaran, pemberian order, auditing, dan perencanaan bisnis. Semua aktivitas yang dilakukan adalah upaya menumbuhkembangkan dan meningkatkan nilai kewirausahaan yang di dalam penelitian ini disebut "*pembelajaran nilai kewirausahaan*".

LSM WPU juga menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga baik pemerin-

tah maupun swasta dalam teknis operasional pembelajaran nilai kewirausahaan, di samping menjalin kemitraan dengan Swisscontact Foundation sebagai mitra tetap. Lembaga mitra kerja itu di antaranya Yayasan Dharma Bhakti Astra, Unit Informasi Industri Kecil, Lembaga Komunikasi Bapak Angkat Industri Kecil, Pembinaan Untuk Pengembangan Usaha Kecil, Balai Besar Logam dan Mesin, Politeknik Manufaktur Swiss Institut Teknologi Bandung, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Negara. Jaringan kemitraan merambah berbagai bidang di antaranya teknis operasional pembinaan, tenaga ahli, pembiayaan, sarana dan prasarana.

Tujuan LSM WPU dan/atau lembaga mitra kerja membelajarkan wirausaha industri kecil melalui pengembangan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang pengelolaan dan pengembangan industri atau tentang kewirausahaan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan nilai kewirausahaannya. Berdasarkan nilai ini diharapkan, sikap dan perilaku kewirausahaannya berkembang lebih baik dan teraktualisasi di dalam kehidupan keseharian baik pada saat mengelola dan mengembangkan industrinya maupun pada saat yang lain. Pada gilirannya, industri yang dikelola dan dikembangkan menjadi "*industri kecil yang berkembang, lebih baik dan mandiri*". Industri kecil yang berkembang dapat dilihat dari beberapa sisi di antaranya jumlah produk, aset, modal kerja, gaji, karyawan, investasi, luas lokasi, jenis dan ragam produk. Industri yang lebih baik ditunjukkan oleh indikator situasi dan kondisi kerja, sistem, organisasi, manajemen, proses produksi, pemasaran, suplay bahan mentah, mesin, alat dan lain-lain. Industri kecil yang mandiri ditinjau dari posisi tawar, rentang pasar, pengelolaan dan pengembangannya.

Seiring dengan perkembangan dan kemandirian industrinya, pendapatan wirausaha tersebut diharapkan meningkat dan pada gilirannya kemampuan ekonominya menjadi lebih baik. Sikap dan perilaku mengelola dan mengembangkan industri seperti inilah yang kemudian dinyatakan dengan konsep "*sikap dan perilaku*

*kewirausahaan*". Sikap dan perilaku kewirausahaan ini tentu dilandasi oleh suatu nilai yang diyakini, dijadikan acuan, kriteria dan pedoman di dalam mengambil keputusan, mengelola dan mengembangkan industrinya. Nilai inilah yang disebut "*nilai kewirausahaan*". Berdasarkan keadaan ini, upaya yang perlu dilakukan terhadap wirausaha industri kecil adalah pembelajaran nilai kewirausahaan. Karena itu, "*nilai kewirausahaan dan pembelajarannya*" menjadi objek fokus kajian penelitian.

Ada beberapa fungsi pembelajaran nilai kewirausahaan yang dilakukan LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya di antaranya penyadaran, pemberdayaan dan pemandirian wirausaha industri kecil. Penyadaran adalah upaya pemberian pengetahuan, pemahaman, penghayatan, cara menganalisis dan mengatasi tentang masalah, kelemahan, kekurangan dan kendala yang dialami wirausaha anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur di dalam pengelolaan dan pengembangan industrinya. Pemberdayaan adalah upaya memberikan motivasi, semangat, kekuatan dan gairah kepada wirausaha industri kecil anggota asosiasi sehingga mereka terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang pengelolaan dan pengembangan industrinya. Pemandirian adalah upaya secara bertahap dan berangsur-angsur menjadikan wirausaha industri kecil mengurangi ketergantungannya terhadap pihak lain. Pembelajaran ini dilaksanakan di luar sekolah, tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan seperti pendidikan sekolah. Instruktornya adalah pembina (manager dan konsultan) di LSM WPU dan tenaga ahli di bidangnya yang ada di lembaga mitra kerjanya baik swasta, pemerintah maupun masyarakat.

Penyusunan dan perumusan program pembelajaran nilai kewirausahaan yang dilakukan oleh dewan pengurus asosiasi dan didampingi oleh pihak LSM WPU didasarkan atas kebutuhan wirausaha industri kecil target grupnya. Target grup adalah semua wirausaha anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur yang dijadikan sasaran

binaan LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya. Untuk mengetahui kebutuhan mereka, penyusun dan perumus program pembelajaran mengumpulkan data dengan cara mengedarkan angket, melakukan observasi, wawancara, konsultasi dan evaluasi. Di samping itu, LSM WPU mengadakan pertemuan tahunan antar wirausaha anggota asosiasi yang dilakukan setiap akhir tahun. Data yang dikumpulkan tentang permasalahan, hambatan, kendala, harapan, kebutuhan dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan industri kecil. Data ini dijadikan bahan pertimbangan menyusun dan merumuskan program membelajarkan wirausaha anggota asosiasi untuk jangka waktu setahun.

Program pembelajaran yang disusun dan dirumuskan oleh dewan pengurus asosiasi dan didampingi oleh pihak LSM WPU sebagai pembina, jenisnya relatif beragam. Jumlah dan ragam program pembelajaran yang disusun dan dirumuskan tergantung pada jenis dan ragam data yang diperoleh. Program itu misalnya program pelatihan, workshop, magang, supervisi, konsultasi, asistensi, temu bisnis, kunjungan ke industri, diskusi, seminar, pemberian rekomendasi, pengurusan surat ijin, pemasaran, auditing, dan perencanaan bisnis. Program pembelajaran ini disusun dan dirumuskan setiap akhir tahun. Program inilah sebagai program pembelajaran yang diprioritaskan untuk dilaksanakan di tahun mendatang.

Jika dilihat dari sisi undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang PLS dan konsep yang dikemukakan oleh Sutaryat Trisnamansyah (1968:1.23-1.24) serta Djudju Sudjana (1989: 51) maka *kemitraan pola pembinaan* yang dijalin antara LSM WPU dengan wirausaha industri kecil anggota asosiasi yang menekankan pembelajaran dapat *dikatakan penyelenggaraan PLS*.

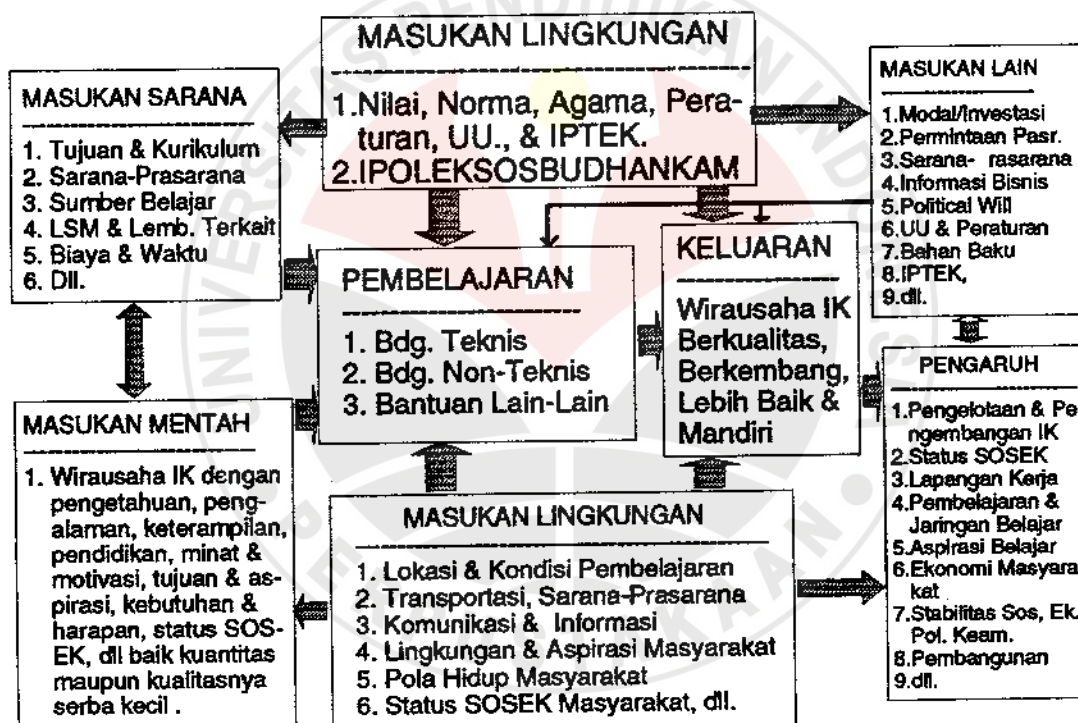
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan konsep yang dikemukakan oleh

Sutaryat Trisnamansyah yang dijadikan acuan untuk menyatakan bahwa kegiatan LSM WPU merupakan kegiatan PLS dapat ditinjau dari beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah *unsur sponsor atau pengelola* (LSM WPU dan instansi terkait), *unsur misi atau tujuan* (pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia), *unsur perubahan perilaku atau hasil* (perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku wirausaha industri kecil di dalam kehidupannya khususnya di dalam pengelolaan dan pengembangan industrinya), *unsur proses atau bahan/alat dan pelaksanaan* (media cetak, elektronika, audio visual, personal, disengaja dan tidak disengaja), *unsur partisipan atau warga/sumber belajar* (wirausaha industri kecil, personil LSM, personel lembaga mitra kerja, instansi terkait), *unsur dana* (dana dari Swiss-contact Foundation, wirausaha industri kecil, dan lembaga lain), *unsur lokasi* (di luar sekolah), *unsur azas* (azas kebutuhan, relevansi, inovasi, dan sepanjang hayat), *unsur jenjang* (tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan), dan *unsur jenis* (kejuruan teknik dan manajemen).

PLS sebagai sistem yang dijadikan acuan untuk menyatakan bahwa kegiatan LSM WPU merupakan kegiatan PLS sebagaimana dikemukakan Djudju Sudjana (1989:50) adalah meliputi: *masukan mentah* (wirausaha industri kecil dengan karakteristiknya di antaranya meliputi pengetahuan, pengalaman, keterampilan, pendidikan, minat & motivasi, tujuan & aspirasi, kebutuhan dan harapan, dan status SOSEK, baik kuantitas maupun kualitasnya yang serba kecil), *masukan sarana* (tujuan, kurikulum, sarana-prasarana, sumber belajar, biaya, pengelola/LSM dan lembaga terkait, dan waktu), *proses* (mempelajari wirausaha industri kecil di bidang teknis, non-teknis dan bantuan lain-lain yang dipengaruhi oleh berbagai masukan seperti masukan sarana, masukan mentah, masukan lingkungan), *masukan lingkungan* (nilai, norma, aturan, undang-undang, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lokasi & kondisi pembelajaran,



transportasi, sarana-prasarana, komunikasi & informasi, lingkungan, aspirasi, pola hidup dan status SOSEK masyarakat), *keluaran* (wirausaha industri kecil berkualitas, dengan industri yang berkembang, lebih baik, dan mandiri), *input lain* (modal/investasi, permintaan pasar, sarana prasarana, informasi bisnis, political will, UU dan peraturan, bahan baku, stabilitas keamanan, tingkat ekonomi masyarakat, dan perkembangan IPTEK), *pengaruh* (pengelolaan dan pengembangan industri kecil, status sosial, ekonomi dan kesehatan, lapangan pekerjaan, pembelajaran & jaring-jaring belajar, aspirasi belajar, ekonomi masyarakat, stabilitas keamanan, dan kelangsungan pembangunan). Sistem ini dapat dilihat pada Bagan 1 di bawah ini.



Bagan 1. Hubungan Fungsional antara Komponen PLS dalam Pembelajaran Nilai Kewirausahaan Industri Kecil (Djudju Sudjana, 1989:50)

Jika diperhatikan secara cermat, Bagan 1 merupakan suatu sistem yang kompleks dan banyak faktor saling berpengaruh. Karena itu, penelitian ini hanya menyoroti sebagian dari sistem yaitu terfokus pada "nilai yang dijadikan acuan perilaku wirausaha dan proses pembelajarannya".

John C. De Wilde di dalam studinya berjudul "India: Non-Formal Education In The Development of Small Enterprise" mengemukakan bahwa pendidikan non-formal adalah "saran dan pengarahan tentang keberadaan, kewirausahaan, keteknikan, managerial, peluang industri, keuangan, aturan pemerintah dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan industri kecil" (Coombs dan Ahmed, 1987:435).

Sudardja Adiwikarta (1994:4) mengemukakan, pendidikan di dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia sekurang-kurangnya melakukan empat peran. *Pertama*, mempersiapkan dan memperbaharui perangkat mental psikologis warga belajar sehingga siap menghadapi yang lebih maju dan berubah sesuai dengan perkembangan serta tuntutan jaman. *Kedua*, mempersiapkan keterampilan dan kemampuan kerja masyarakat yang diperlukan di dalam masyarakat dan dunia kerja. *Ketiga*, mempersiapkan masyarakat dengan sifat kritis dan berani hidup mandiri terlepas dari ketergantungan pihak lain. *Keempat*, mengembangkan kemampuan kreatif dan adaptif di dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki. Jika uraian di atas dijadikan acuan bahwa suatu aktivitas itu dikatakan PLS maka aktivitas LSM WPU dan mitra kerjanya merupakan aktivitas PLS, walaupun mereka secara sengaja tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang PLS.

LSM WPU sebagai pelaku PLS, target grupnya wirausaha anggota asosiasi yang seluruhnya orang dewasa. Rogers (1986) mengemukakan bahwa pendidikan orang dewasa diklasifikasikan menjadi pendidikan formal, ekstra formal dan non-formal (Jones, 1988:145). Pendidikan formal adalah kursus dan kelas yang dilakukan oleh Sekolah, College dan Universitas. Pendidikan ekstra formal adalah kursus dan kelas yang dilakukan oleh agen formal di luar sistem pendidikan seperti lembaga pemerintah non-Depdikbud, agen pelatihan industri, perdagangan dan komersial. Pendidikan non-formal adalah aktifitas pendidikan yang dilakukan oleh agen relawan dan kelompok informal lainnya. Jika klasifikasi pendidikan yang dikemukakan

Rogers ini dijadikan acuan, maka LSM WPU yang dilakukan oleh agen relawan dan kelompok informal di dalam melakukan pembinaan wirausaha anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur dapat dikelompokkan ke dalam pendidikan non-formal.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalam Bab IV Pasal 9 ditegaskan, bahwa

(1) Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. (2) Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. (3) Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis (Sinar Grafika, 1992:5).

Selanjutnya, di dalam Pasal 10 ayat 3 ditegaskan bahwa "pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan" (Sinar Grafika, 1992:5). Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991, Bab I Pasal 1 ayat 1 dan 3 juga ditegaskan lebih jauh, bahwa

(1) Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak. ... (3) Kelompok belajar adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan di dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan (Sinar Grafika, 1992:231).

Mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas maka dapatlah diketahui bahwa aktivitas LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya melakukan pembinaan terhadap wirausaha industri kecil dengan membentuk Asosiasi Industri Kecil Manufaktur sebagai kelompok belajar merupakan aktifitas yang dapat diklasifikasikan ke dalam PLS. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peranan LSM sebagai PLS di dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil ? Berikut ini, peranan LSM khususnya LSM WPU di dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil manufaktur di wilayah Bandung akan diuraikan.

### 3. Peranan LSM di dalam Pengembangan Industri Kecil

LSM berperan sangat penting di dalam pembangunan bangsa Indonesia. "LSM adalah suatu gerakan masyarakat yang muncul dari dan atas prakarsanya, dengan misi kemanusiaan" (Ismid Hadad, 1984:12). "LSM cenderung berupa kolektivitas individu yang didasari oleh rasa kemanusiaan dan kebersamaan (Aswab Mahasin, 1989:10), bekerja untuk masyarakat (Arif Budiman, 1995:123) terbentuk karena didorong oleh kondisi kehidupan masyarakat yang memprihatinkan, meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, hak asasi, lingkungan, politik dan lain-lain. Mereka melihatnya dan nuraninya terpanggil untuk melakukan sesuatu agar dapat mengurangi keprihatinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui aktivitas nyata dengan cara-cara tertentu yang dirasa lebih membantu, mereka berupaya meningkatkan kesejahteraan dan menyahuti aspirasi serta kepentingan masyarakat. Di dalam usaha membela kepentingan masyarakat yang dilayaninya inilah salah satu letak kekuatan LSM.

Di Indonesia, LSM ramai muncul pada tahun 1970-an" (Abdullah Sarwani, 1995:125; Aswab Mahasin, 1989:10; Elridge, 1989:36). Jika dilihat dari dasar kemunculannya, LSM komitmen dengan pengentasan kemiskinan, penghapusan keprihatinan dan memperkecil kesenjangan yang ada di dalam masyarakat. Komitmen ini sesuai dengan salah satu program pembangunan jangka panjang 25 tahun tahap II yang dijadikan prioritas pemerintah yaitu pengentasan masyarakat miskin yang mulai dilaksanakan tahun 1994.

Gunawan (1993) mengemukakan bahwa LSM yang dibentuk oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat sudah lama berperan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ternyata, upaya LSM meningkatkan keswadayaan masyarakat telah berhasil. Kapasitas LSM sebagai pengembang usaha skala kecil telah memperoleh pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak (Erfan M., 1994:231).

Kedekatannya dengan usaha skala kecil yang memungkinkan LSM menguasai masalah secara akurat pada tingkat lapangan. Bahkan di dalam banyak kasus, LSM sudah menjadi bagian dari usaha skala kecil sehingga mudah menggerakkan partisipasi. Di samping itu, LSM mampu bekerja secara sederhana dengan biaya rendah karena berskala kecil dan didorong oleh komitmen sosial.

LSM merupakan potensi bangsa Indonesia mempunyai peranan besar bagi keberhasilan pembangunan nasional jika dilihat dari: (1) *cita-citanya* yaitu menumbuhkan keswadayaan masyarakat menuju dunia yang lebih manusiawi dan demokrasi; (2) *dasar munculnya* yaitu kemanusiaan dan keprihatinan; (3) *sifatnya* yaitu nirlaba, independent, dana pengelolaan kecil, tidak birokratis dan komunikatif; (4) *fungsinya* yaitu perpanjangan tangan, pelengkap program, mitra kerja pemerintah dan kontrol sosial; (5) *orientasinya* yaitu berbasis pada kebutuhan, kekuatan rakyat dan organisasi rakyat yang demokratis; (6) *jumlahnya* ada sekitar 4000 LSM di Indonesia dan bergerak di segala bidang pembangunan.

Di Indonesia, LSM berperan merangsang pertumbuhan, saluran absah partisipasi sosial, mendidik dan memobilisasi masyarakat, penengah antara penerima dan pemberi bantuan dana pembangunan dan bergerak di bawah payung pemerintah (Elridge, 1989:33-35; Aswab Mahasin, 1989:10-11).

LSM memiliki intensitas kegiatan yang relatif tinggi dan jenisnya relatif beragam serta merupakan potensi bangsa Indonesia yang sangat membantu pemerintah di dalam mewujudkan program pembangunannya. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh LSM meliputi pelayanan kesehatan, gizi, kredit pedesaan, pengembangan industri kecil, teknologi tepat guna, latihan partisipatif, pelestarian lingkungan hidup, keluarga berencana, pendidikan, hukum, hak asasi manusia, konsumen, public hearing dengan wakil rakyat, perselisihan perburuhan dan sebagainya.

LSM juga dapat berperan sebagai *fasilitator dan katalisator, pelatih dan pendidik, pemupukan modal, dan penyelenggara proyek stimulan* (Bambang Isma-

wan, 1992:18-19). Sebagai fasilitator dan katalisator, para pembina di LSM yang tinggal ditengah kelompok, membantu memecahkan masalah dan ikut menentukan alternatif pemecahan. Mereka bukan pemimpin kelompok tetapi sahabat kelompok di dalam perjalanan mencapai dan mengembangkan kemandirian. Mereka juga sebagai unsur perekat kearah kerja sama yang saling menguntungkan dan menghidupkan. Sebagai pelatih dan pendidik, mereka mencarikan dan menyalurkan informasi dan pengalaman dari luar ke dalam kelompok melalui pembelajaran. Di sini, hubungan mereka dengan target grup seperti hubungan guru dengan murid, tetapi bukan guru yang maha tahu, melainkan di antara mereka saling belajar. Untuk itu, gaya hidup sang guru diselaraskan dengan gaya hidup target grup. Sebagai pemupuk modal, mereka mendorong upaya penghematan, menabung, usaha produktif, lembaga keuangan, penghubung dengan lembaga keuangan terdekat dan lain-lain. Sebagai penyelenggara proyek stimulan, mereka meningkatkan kemandirian target grup, menarik target grup dari isolasi "rumah keong" dengan stimulan, seperti proyek teknologi tepat guna, pemasaran, produksi, dan lain-lain.

LSM WPU yang ada di wilayah Bandung adalah salah satu dari beberapa LSM di Indonesia. LSM WPU dibentuk melalui proses dan rentang waktu yang relatif panjang dengan penuh dinamika. Sabastian Saragih (1993:7) dan Widya Wicaksana (24-2-1994) mengemukakan bahwa cikal bakal LSM WPU adalah LSM Yayasan Mandiri. Jika ditelusuri sejarah berdirinya, LSM Yayasan Mandiri didirikan oleh para mahasiswa aktifis ITB tahun 1978. LSM WPU menjalin kemitraan *pola pembinaan* dengan industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik yang ada di wilayah Bandung. Program kemitraan pola pembinaan ini merupakan upaya pembelajaran nilai kewirausahaan kepada wirausaha industri kecil. Karena itu, LSM WPU berperan penting di dalam pembangunan industri kecil khususnya industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik di wilayah Bandung.

Pemerintah memprioritaskan pengembangan dan peningkatan industri kecil dan menengah di Indonesia. Hendrawan Supratikno, *et al.*, (1994:27-28) mengemukakan, pemerintah dapat melakukan pembinaan industri kecil melalui tiga pendekatan, yaitu (1) *nonpolicy approach*, untuk kegiatan industri kecil yang bergerak pada kegiatan marginal, (2) *proteksi bagi industri kecil*, merupakan larangan kepada industri besar menghasilkan produk tertentu, batasan import terhadap produk substitusi, dan (3) *stimulation approach program pembinaan*, yang dapat ditinjau dari dua sisi orientasi, yaitu (a) *orientasi penawaran*, meliputi pemberian kredit, pendirian unit pelayanan teknis, pusat pengembangan industri kecil, lingkungan industri kecil, bimbingan dan pengembangan industri kecil, koperasi industri dan kerajinan rakyat, fasilitas kredit Bank seperti kredit industri kecil, kredit modal kerja permanen, kredit usaha kecil, pemberian kursus (Irsan Azhari, 1991:11-13; Soeharto, 1990:381), dan (b) *orientasi permintaan*, meliputi pemasaran, subkontraktor, dan permintaan langsung terhadap produk industri kecil. *Stimulation approach* yang berorientasi penawaran ini dominan dilakukan, sedangkan yang berorientasi permintaan masih mengalami banyak hambatan. Instansi swasta dan LSM juga banyak melakukan berbagai upaya dan program pembinaan usaha skala kecil dengan berbagai cara untuk mengembangkan dan meningkatkannya.

Dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1232 tentang bantuan Badan Usaha Milik Negara/Swasta (BUMN/S) terhadap usaha skala kecil dan menengah sebanyak 1% s/d 5% dari laba bersihnya (Depkop, 1995:3), yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan management, meningkatkan keterampilan teknik, meningkatkan modal kerja, membantu pemasaran, dan memberikan jaminan untuk memperoleh kredit di Bank (Lalka, 1992:6; Depprin, 1990:14). Juga, ditetapkannya Deklarasi Bali tahun 1995 tentang komitmen pengusaha berskala besar membantu usaha skala kecil dan menengah serta peraturan keuangan tentang bantuan

Bank terhadap usaha skala kecil dan menengah dengan kredit tanpa agunan pada bulan Agustus 1995. Ditopang dengan dikembangkannya program bapak angkat - anak angkat antara usaha berskala besar dengan usaha berskala kecil dan menengah, antara LSM atau lembaga lain dengan usaha berskala kecil dan menengah yang pada akhir-akhir ini digalakkan pemerintah dan dijadikan gerakan nasional, merupakan iktikad baik dan kesungguhan pemerintah mengembangkan usaha berskala kecil dan menengah di Indonesia. Hal ini dapat juga dijadikan indikator bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh meningkatkan dan mengembangkan usaha skala kecil dan menengah tidak terkecuali industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur di wilayah Bandung.

Walaupun pemerintah, LSM dan lembaga swasta telah melakukan berbagai program pembinaan industri kecil, sebagian besar mereka di dalam mengelola dan mengembangkan industrinya masih mengalami berbagai masalah dan kendala. Mereka masih relatif sedikit yang dapat mengelola dan mengembangkan industrinya menjadi berkembang lebih baik. Disparitas perkembangannya sangat relatif besar baik antara kelompok industri maupun antara jenjang kelompok industri. Namun demikian, industri kecil dapat juga bertahan karena bergerak di dalam pasar yang terpecah-pecah (fragmented market), fenomena skala ekonomi kurang penting sehingga keuntungan yang diperoleh dari besarnya industri tidak menonjol, pasarnya memiliki konsumen yang bervariasi, dan produknya memiliki elastisitas pendapatan yang tinggi, dan tingkat heterogenitas yang tinggi khususnya heterogenitas teknologi yang bisa digunakan.

Industri kecil masih banyak mengalami masalah pengelolaan dan pengembangannya. Hasil seminar Strategi Pelaksanaan Pola Subkontrak antara Industri Besar dengan Industri Kecil dan Menengah yang dilaksanakan di ITB Tanggal 25 s/d 26 Januari 1995 mengungkapkan, kendala dasar dalam pembinaan pengusaha kecil yaitu



rendahnya tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia pengusaha kecil sehingga menimbulkan kendala-kendala yang lebih spesifik di dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Data dari beberapa literatur, wawancara peneliti dengan pengusaha kecil dan para ahli di lapangan ditemukan juga bahwa permasalahan yang dominan dihadapi usaha skala kecil dan menengah khususnya sektor industri adalah tentang "kualitas sumber daya manusianya". Masalah kualitas sumber daya manusia ini terutama tentang "kewirausahaannya". Erfan Maryono (1994:229) menegaskan bahwa "kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha skala kecil sangat lemah dan mereka sangat sedikit memiliki semangat entrepreneur". Hal ini tercermin di dalam perilaku mereka mengelola dan mengembangkan usahanya. Hanya sedikit wirausaha industri kecil yang memiliki semangat entrepreneur dan biasanya hanya lapisan paling atas, sedangkan sebagian besar hanya tenaga kerja. Karena itu, kepekaan terhadap peluang usaha yang menjadi ciri entrepreneur sulit diharapkan tumbuh dari mereka. Kewirausahaan seseorang merupakan aktualisasi nilai yang diyakininya. Juga, *permodalan, produksi, pemasaran, management, bahan baku, sarana-prasarana*" masih menjadi masalahnya (Marbun B.N., 1993:31-38; Achmad Hidayat, 17-1-1994; Entjep Kartiwa, 5-1-1992; Jamil Yusuf, 20-1-1994; Juarsah *et al.*, 25-12-1993; Noer Majid, 1993:1; Subiyakto Tjakrawerdya, 1994:2; Tungki Ariwibowo, 1992:xi; Muchtar Zein, 1991:39; Martani *et al.*, 1993:162).

Sebagian besar wirausaha industri kecil bertingkat pendidikan relatif rendah. Berdasarkan catatan Biro Pusat Statistik Indonesia tahun 1993 diketahui, ada sekitar 78.518.372 orang penduduk berumur lebih dari 10 tahun dan status pekerjaannya dikaitkan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Dari jumlah ini, 15.744.624 orang atau 20,05% yang berwirausaha. Tingkat pendidikan mereka masing-masing adalah *tidak sekolah sampai Sekolah Dasar (SD) ada 7.426.739*

orang atau 47,17%, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ada 4.260.495 orang atau 27,06%, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ada 2.478.203 orang atau 15,74%, Diploma (D1 s/d D3) ada 1.275.316 orang atau 8,10%, dan Sarjana (S1 s/d S3) ada 299.148 orang atau 1,90%. Berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa sebagian besar wirausaha industri kecil memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Selain itu, pusat-pusat pendidikan dan pelatihan di Indonesia dan Malaysia saat ini dihadapkan pada masalah belum diketahuinya secara pasti apa cara-cara pelatihan yang terbaik untuk pengusaha kecil (Clapham, 1991:-125). Karena itu, pola pembinaan industri kecil yang dapat mengatasi permasalahan tersebut perlu segera ditemukan.

Pembinaan bermuatan PLS yang mampu membina pengusaha industri kecil agar memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap dan perilaku yang diperlukan guna mengembangkan diri berkaitan dengan pekerjaannya atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Bumi Aksara, 1992:232) kiranya dapat menjawab permasalahan yang dihadapi wirausaha industri kecil.

Pembelajaran di dalam suatu program dan setting yang sama tidak selamanya menghasilkan homogenitas pengeluaran. Upaya pembinaan industri kecil melalui pembelajaran nilai kewirausahaan dengan pola kemitraan yang dilakukan oleh LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya menghasilkan industri kecil yang bervariasi. Ada industri kecil yang berkembang menjadi lebih baik, berhasil dan mandiri, ada yang biasa saja seperti sebelum dibina dan ada juga yang gagal. Heterogenitas hasil ini mencerminkan keragaman penerapan sikap dan perilaku kewirausahaan wirausaha industri kecil. Perilaku ini menggambarkan nilai kewirausahaan yang diyakini, dijadikan pedoman, kriteria, cita-cita dan aspirasi wirausaha di dalam mengelola dan mengembangkan industrinya.

Ada juga wirausaha industri kecil yang dapat mengelola dan mengembangkan industrinya menjadi berkembang, lebih baik dan mandiri walaupun tidak pernah mendapat pembinaan atau tidak pernah mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan LSM. Dari sini diketahui bahwa kemampuan wirausaha industri kecil mengelola dan mengembangkan industrinya atau kemampuan kewirausahaannya tidak hanya diperoleh dari program pembinaan yang dilakukan secara terprogram tetapi bisa diperoleh dari lingkungan keluarga, masyarakat, tempat kerja, agama, budaya dan lain-lain. Juga, perolehan nilai kewirausahaan ini melalui proses dan rentang waktu yang panjang dan beragam. Demikian halnya, nilai kewirausahaan pengusaha industri kecil yang dijadikan acuan, cita-cita, dan tujuan bersikap dan berperilaku mengelola dan mengembangkan industrinya juga bisa didapat dari lingkungan keluarga, masyarakat, tempat bekerja, agama, budaya dan lain-lain dalam rentang waktu yang panjang. Jadi, peranan dan fungsi program pembinaan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun LSM lebih cenderung sebagai stimulan atau stimulation approach. Karena itu, nilai kewirausahaan yang dijadikan acuan, cita-cita, tujuan dan kriteria wirausaha di dalam mengelola dan mengembangkan industri sehingga berkembang, lebih baik dan mandiri perlu ditemukan, di samping penumbuhkembangan dan peningkatan nilai kewirausahaan melalui pembelajaran. Dari temuan ini diharapkan, konsep pembelajaran ini dapat dikembangkan dan dijadikan salah satu bentuk pembelajaran nilai kewirausahaan sehingga dapat dicapai hasil yang optimum.

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang muncul adalah upaya apa dan aktivitas yang bagaimana sebaiknya dilakukan agar diperoleh temuan tentang nilai kewirausahaan dan strategi peningkatannya ? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian yang berkaitan dengan bidang nilai kewirausahaan dan pembelajarannya perlu dilakukan.

## B. Fokus dan Masalah Penelitian

Pertumbuhan masyarakat negara maju, seperti Jepang, Amerika, dan Taiwan, fungsi wirausaha sangat menentukan, di samping golongan lain. Masalah yang dihadapi bangsa Indoensia saat Merdeka adalah di kalangan bangsa Indonesia asli masih sangat kurang "*kaum pengusaha atau wirausaha*" di segala tingkatan, dan dunia ekonomi dikuasai oleh orang Cina (Sayidiman S., 1986:114-117). Wirausaha atau pengusaha skala kecil khususnya wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik di wilayah Bandung yang sebagian besar dimiliki bangsa Indonesia asli masih menghadapi berbagai masalah di dalam pengelolaan dan pengembangan industrinya agar dapat berkembang, lebih baik dan mandiri. Walaupun banyak masalah dihadapi wirausaha ini yang meliputi masalah modal, produksi, pemasaran, sarana dan prasarana yang digunakan, tetapi jika ditelusuri secara mendalam semua masalah ini bersumber pada kualitas sumber daya manusianya, khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaannya.

Jadi, masalah pokok yang dihadapi wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik di wilayah Bandung dalam pengelolaan dan pengembangan industrinya adalah "*masalah sikap dan perilaku kewirausahaannya*". Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar wirausaha memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, pengetahuan, keterampilan dan keahlian wirausaha di dalam mengelola dan mengembangkan industrinya hanya didapat dari bekerja sambil belajar atau warisan dari orangtuanya.

Masalah kewirausahaan dapat dilihat dari sikap dan perilaku wirausaha idustri kecil pada saat mengelola dan mengembangkan industrinya. Sikap dan perilaku kewirausahaan ini tentu dilandasi oleh nilai yang diyakini, dijadikan kriteria, pedoman, cita-cita, tujuan dan aspirasi hidupnya. Karena itu, akar permasalahan tentang kewirausahaan ini terletak pada nilai yang diyakini, dijadikan acuan, pedoman,

tujuan, cita-cita dan aspirasi di dalam pengelolaan dan pengembangan industrinya.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kewirausahaan yang dihadapi wirausaha industri kecil khususnya yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan nilai kewirausahaannya. Pengembangan dan peningkatan nilai kewirausahaan melalui pembelajaran adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kewirausahaan. Karena itu, penelitian ini difokuskan pada *"pembelajaran nilai kewirausahaan industri kecil khususnya pembelajaran nilai kewirausahaan industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur yang dilakukan LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya di wilayah Bandung"*.

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka masalah utama yang akan diteliti dirumuskan di dalam dua bentuk pertanyaan, yaitu

1. Bagaimana nilai kewirausahaan yang diyakini, dijadikan acuan, kriteria, pedoman, cita-cita, tujuan dan aspirasi oleh wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur di wilayah Bandung, di dalam pengelolaan dan pengembangan industrinya ?
2. Bagaimana pembelajaran nilai kewirausahaan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Pengembangan Usaha (LSM WPU) dan lembaga mitra kerjanya terhadap wirausaha anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur (pengolahan logam, karet dan plastik) di wilayah Bandung ?

Berdasarkan kedua masalah pokok penelitian di atas, agar apa yang akan dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data penelitian di lapangan lebih terarah dan jelas, definisi operasionalnya disusun dan dirumuskan seperti diuraikan di bawah ini. Definisi inilah yang dijadikan pedoman aktivitas peneliti di dalam melakukan penelitian di lapangan.

### C. Definisi Operasional

*Nilai kewirausahaan* adalah konsep yang ada di dalam pikiran wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik, keberadaannya dianggap penting, diyakini, dijadikan kriteria, pedoman, cita-cita, tujuan dan aspirasi di dalam pengelolaan dan pengembangan industrinya. *Nilai ini meliputi enam kelompok yaitu nilai teori, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai kuasa, nilai agama dan nilai estetika. Nilai teori* teraktualisasi di dalam perilaku inovatif, fleksibel, kreatif, serba bisa, memiliki banyak sumber, dan mengetahui banyak. *Nilai sosial* teraktualisasi di dalam perilaku berani mengambil resiko yang diperhitungkan, suka pada tantangan, dermawan, perikemanusiaan, suka mengabdikan diri kepada sesama. *Nilai ekonomi* teraktualisasi di dalam perilaku kerja keras sebagai kebutuhannya, berorientasi laba (profit), tekun dan tabah, tekad keja keras, punya dorongan kuat, energetik dan memiliki inisiatif tinggi. *Nilai kuasa* teraktualisasi di dalam perilaku dapat bergaul dengan orang lain, tanggap terhadap saran dan kritik, dan berperilaku sebagai pemimpin. *Nilai agama* teraktualisasi di dalam perilaku yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, individualitas, dan optimis. *Nilai estetika* teraktualisasi di dalam perilaku cinta akan rasa keindahan, menyenangkan hal-hal yang indah, dan berkreasi dengan rasa keindahan. Semua nilai yang teraktualisasi di dalam perilaku ini muncul dan dapat diteliti di antaranya pada saat wirausaha anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur melakukan pengelolaan dan pengembangan industrinya, di dalam penampilan dan di dalam kehidupannya.

*Wilayah Bandung* adalah daerah yang menunjukkan tempat penelitian dilakukan, dan wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik, LSM WPU serta Asosiasi Industri Kecil Manufaktur yang dijadikan subyek penelitian ini berada. Wilayah ini meliputi kabupaten tingkat dua dan Kotamadya Bandung.

*Wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik* adalah pengusaha atau pemilik industri kecil yang terlibat di dalam usaha di bidang proses produksi pengolahan bahan mentah logam, pengolahan bahan setengah jadi karet dan plastik menjadi bahan jadi. Bahan mentah yang diolah adalah besi baru, besi bekas, karet dan plastik yang telah diolah menjadi bahan setengah jadi. Bahan jadi adalah bahan yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari berupa alat dapur, alat mesin atau industri, alat olah raga atau kesehatan, alat pertanian dan lain-lain.

*Industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur* adalah unit usaha pengolahan bahan mentah logam, karet dan plastik menjadi bahan jadi, dan mereka anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur atau anggota Asosiasi ProBengkel. *Asosiasi Industri Kecil Manufaktur atau Asosiasi ProBengkel* adalah suatu wadah berbentuk organisasi bersifat swadaya yang didirikan oleh wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik binaan LSM WPU di Bandung.

Definisi besar atau kecilnya industri dapat ditinjau dari beberapa sisi yaitu jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, jumlah aset dan lain-lain. Definisi ini relatif beragam tergantung pada sipembuat dan pengguna definisi dan selalu dikaitkan dengan tingkat kepentingan dan tujuannya (Lempelius, 1979: 6; Irsan A., 1991:17; Bittle L.R. *et al.* 1989:75; Martani *et al.* 1983:167-168 ;Depperin., 1990:5; James K., 1992:4). Di dalam penelitian ini, definisi besar atau kecilnya industri yang digunakan adalah ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja. Definisi ini dikutip dari definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Definisi tersebut adalah *industri kecil manufaktur adalah jenis industri pengolahan yang memiliki jumlah tenaga kerja 6 s/d 19 orang.*

Ada beberapa pertimbangan dipilihnya definisi industri kecil di atas, di antaranya penelitian ini ingin menyingkap hal-hal yang berkaitan dengan kualitas

sumber daya manusia khususnya tentang nilai kewirausahaan anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur. Di samping itu, ingin menyingkap pembelajaran nilai kewirausahaan yang dilakukan oleh LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya terhadap wirausaha industri kecil tersebut.

*Pengelolaan industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik yang dimaksud di sini adalah yang dilakukan wirausaha, yaitu segala aktivitas wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik mengerjakan pekerjaannya sehari-hari di industrinya, di antaranya mencakup management, penyediaan bahan, produksi, pemasaran, finansial, dan sumber daya.*

*Pengembangan industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik yang dimaksud di sini adalah yang dilakukan oleh wirausaha, yaitu aktivitas wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik di antaranya meliputi penambahan dan perluasan usaha, modal, kualitas dan kuantitas produksi, pekerjaan, pekerja, sumber daya manusia dan non-manusia, pemasaran, management dan administrasi.*

*Pembelajaran nilai kewirausahaan industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik adalah pengembangan dan peningkatan nilai yang dianggap penting, diyakini, dijadikan kriteria, pedoman, cita-cita, tujuan dan aspirasi wirausaha anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur di wilayah Bandung di dalam bersikap dan berperilaku mengerjakan pekerjaannya sehari-hari di industrinya sebagai seorang wirausaha. Pengembangan dan peningkatan ini dilakukan oleh LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya dengan pemberian pengetahuan, keterampilan, keahlian, bantuan konsultasi, rekomendasi, modal, auditing, informasi, pemasaran, perencanaan produk, penataan organisasi, pembenahan keuangan, pengurusan surat ijin, pembuatan rencana bisnis dan sebagainya. Pembelajaran nilai kewirausahaan ini berupa rincian aktivitas LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya yang membentuk suatu rangkaian aktivitas yang dipengaruhi oleh masukan sarana (tujuan kurikulum, sarana-prasarana,*



sumber belajar, instansi terkait, biaya dan waktu), masukan mentah (wirausaha industri kecil dengan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, pendidikan, minat dan motivasi, tujuan dan aspirasi, kebutuhan dan harapan, sosial, ekonomi, dan kesehatan), masukan lingkungan (nilai dan norma, undang-undang, aturan-aturan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, lokasi, transportasi, komunikasi, informasi, perkembangan IPTEK, aspirasi masyarakat dan sebagainya), dan masukan lain-lain (modal atau investasi, permintaan pasar, sarana-prasarana, informasi bisnis, political will, UU dan peraturan, IPTEK, dan bahan baku). Pembelajaran nilai kewirausahaan dikaji dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjutnya.

*Pengembangan dan peningkatan nilai kewirausahaan anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur adalah* aktivitas LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya menjadikan wirausaha anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur dapat memproduksi barang dengan kualitas yang lebih baik dan kuantitas lebih banyak, dapat mengelola keuangan secara tertib dan lebih baik, dapat memasarkan produksinya lebih lancar, dapat mencari kredit modal sesuai kebutuhan dengan lebih mudah, dapat lebih paham memilih bahan baku yang berkualitas, dapat membeli bahan baku lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan, dapat meningkatkan pendapatan industri, pengusaha dan karyawannya, dapat menambah investasi mesin dan non-mesin lebih besar, dapat meningkatkan posisi tawar di dalam pasar, dapat bersaing dengan industri lain dan dapat membentuk jaringan pasar yang lebih luas.

*Aktivitas LSM membina wirausaha anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur adalah* kegiatan LSM membelajarkan wirausaha anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur melalui berbagai cara seperti pelatihan, workshop, magang, seminar, kunjungan ke industri, konsultasi, pemberian rekomendasi, perencanaan bisnis, pemasaran, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar bagi wirausaha.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini yang diangkat dari latar belakang, fokus dan masalah penelitian, adalah

1. Menyingkap nilai kewirausahaan yang diyakini, dijadikan pedoman, acuan, kriteria, tujuan, cita-cita dan aspirasi wirausaha anggota Asosiasi Industri Kecil Manufaktur yang direalisasikan dan diaplikasikan di dalam pengelolaan dan pengembangan industrinya sehari-hari.
2. Menyempurnakan ide, konsep dan wawasan pembelajaran nilai kewirausahaan terhadap wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik berdasarkan azas, konsep dan teori PLS yang dirumuskan di dalam bentuk proposisi bersifat "hypothesis generating" dengan harapan pembelajaran dapat dilakukan lebih efisien, efektif dan mencapai hasil yang optimum.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Sekurang-kurangnya, penelitian ini memiliki tiga kegunaan, yaitu

1. Memberikan sumbangan teoretik konseptual tentang pengembangan satuan, jenis, program, proses dan tujuan PLS kepada dunia pendidikan khususnya dunia PLS, untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kewirausahaan khususnya tentang nilai kewirausahaan sehingga diyakini, dijadikan pedoman, kriteria, tujuan, cita-cita dan aspirasi wirausaha dalam mengelola dan mengembangkan industrinya.
2. Memberikan sumbangan ide, konsep dan wawasan tentang PLS kepada dunia pendidikan khususnya dunia PLS dalam meningkatkan pendidikan dan pembelajaran untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ide konsep dan wawasan ini diharapkan dapat dijadikan khasanah ilmu pengeta-

huan dan kajian tentang PLS bagi mereka yang membutuhkan dan ingin mendalaminya.

3. Memberikan sumbangan ide, konsep dan wawasan tentang pembinaan industri kecil melalui pembelajaran nilai kewirausahaan di dalam bentuk kemitraan pola pembinaan kepada lembaga pembina industri kecil khususnya LSM WPU dan lembaga mitra kerjanya yang membina wirausaha industri kecil pengolahan logam, karet dan plastik sehingga dicapai hasil optimim.

